

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh orang tua, negara maupun pemerintah. Kejahatan Seksual (Tindak Pidana Persetubuhan) merupakan salah satu contoh kejahatan yang terjadi terhadap anak. Anak-anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) merupakan korban yang paling banyak dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan melalui berbagai modus operandi. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu pertama Bagaimana pengaturan sanksi pidana dalam Tindak Pidana Persetubuhan menurut KUHPidana dan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kedua Bagaimanakah penerapan sanksi Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri dalam Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Metode penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, penelitian ini terdiri atas data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil analisis bahwa Pengaturan sanksi pidana dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri, pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Karena dalam hal ini ayah tiri termasuk kedalam golongan Orang Tua dan termasuk juga kedalam unsur pemberat (delik kualifisir). Dan pada Penerapan sanksi Pidana Persetubuhan oleh ayah tiri terhadap anak dalam kasus Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN.Bdg ini seharusnya terdakwa diterapkan hukuman karena telah melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengingat bahwa pelaku dari Tindak pidana persetubuhan ini adalah sang ayah tiri korban. Dan unsur-unsur di dalam Pasal 81 ayat (3) ini lebih memenuhi terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Kata kunci : Anak, Tindak Pidana Persetubuhan, Pengaturan Sanksi, Penerapan Sanksi

ABSTRACT

Children are part of human rights that must be guaranteed and protected by parents, the state and the government. Sexual crime (the crime of sexual intercourse) is an example of crimes that occur against children. Minors (under 18 years) are the most victims of the crime of sexual intercourse committed through various modus operandi. The problems in this thesis are, first, how to regulate criminal sanctions in criminal acts of sexual intercourse according to the criminal code and law no 35 of 2014 concerning child protection and second, how is the application of the criminal act of sexual intercourse against children committed by the stepfather in case No. 482 / Pid.Sus / 2020 / PN.Bdg. This research method is normative law research, this research consists of secondary data or library materials. Based on the results of the analysis, the regulation of criminal sanctions in the Crime of Intercourse committed by the stepfather, the penalty will be added by 1/3 (one third) according to what is regulated in article 81 paragraph (3) of the Child Protection Law. Because in this case the stepfather is included in the class of parents and is also included in the weight element (qualitative offense). And on the application of the criminal sanction of intercourse by the stepfather against the child in the case Number 482 / Pid.Sus / 2020 / PN.Bdg, the defendant should have applied the penalty for violating Article 81 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, remembering that the perpetrator of this criminal act of sexual intercourse is the victim's stepfather. And the elements in Article 81 paragraph (3) are more relevant to what the defendant has done.

Keywords : Children, Crime of Intercourse, Sanctions Arrangement, Application of Sanctions